



EDITORIAL

Pada Volume 1 Nomor 3, Padjir mempersempatkan beberapa artikel dengan tema *human trafficking*, diplomasi publik dan keamanan siber. Ketiga isu ini merupakan isu-isu terkini yang berkembang dinamis dalam Studi Hubungan Internasional.

Pada artikel pertama, Anggie Pratiwi Putri Yunda membahas berbagai strategi yang dilakukan Indonesia dalam menangani *human trafficking* di Selat Malaka dari sisi implementasi, kerjasama, penelitian dan evaluasi, dan pelebagaan. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat mulai dari ratifikasi Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Manusia Khusus tentang Perempuan dan Anak, kerjasama Indonesia dengan MALINDO, Amerika Serikat, dan IMO, dan membentuk lembaga penanganan *human trafficking* di Selat Malaka.

Dalam artikel kedua, Anggia Tiffany dan Fuad Azmi menganalisis penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 sebagai Diplomasi Publik Indonesia dari sisi strategi monolog, dialog dan kolaborasi.

Dalam artikel ketiga, dilatarbelakangi kasus kebocoran data di Indonesia, Wisnu Handi Prabowo, Satriya Wibawa, dan Fuad Azmi membahas mengenai perlindungan data personal siber di Indonesia. Masyarakat Indonesia menghadapi ancaman kebocoran data pribadi yang tidak hanya berasal dari perusahaan teknologi asing, tetapi juga dari kesalahan pengelolaan SIM Card dari pemerintah Indonesia.

Dalam artikel keempat, Eka Rahma Nurhanifa, Neneng Konety dan Nurhasan Affandi membahas mengenai diplomasi publik baru Indonesia terhadap UNESCO mengenai pengusulan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok sebagai Geopark Global UNESCO.

Dalam Artikel kelima, Ilham Akbar Fitriyadi dan Gilang Nur Alam membahas mengenai musik dangdut sebagai sebuah globalisasi budaya populer Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. Musik Dangdut telah dikenal di Malaysia, Singapura, Timur Leste, Brunei Darussalam, dan lainnya. Globalisasi musik dangdut diupayakan juga oleh Pemerintah Indonesia, misalnya, dengan mempersempatkan genre musik tersebut pada acara Pembukaan ASIAN GAMES 2018.

Dalam artikel keenam, Trisa Monika Tampubolon dan Rizki Ananda Ramadhan menganalisis mengenai perlindungan data personal digital oleh ASEAN. ASEAN PDP berperan penting dalam meningkatkan program dan kebijakan keamanan siber di Asia Tenggara melalui ASEAN ICT Masterplan 2020 dan Work Plan on ASEAN Cyber dalam hal digitalisasi ASEAN.

Dalam artikel ketujuh, Wawan B. Darmawan, Jafar Alkadrie dan Arfin Sudirman mengkaji tentang kerjasama kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam pengadaan kapal Selam sebagai upaya pemenuhan *minimum essential force* militer RI.

Dalam artikel kedelapan, Iskandar Hamonangan dan Zainab Assegaff membahas mengenai Cyber Diplomacy dari sisi fungsi, yakni: sebagai alat komunikasi internasional untuk membangun norma siber bersama dan sebagai upaya untuk meminimalkan gesekan di ruang siber.

Terakhir, artikel dari M. Irsan Efendi Nasution membahas mengenai Kesesuaian *Lethal Autonomous Weapon Systems* dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional. Di akhir tulisannya, para penulis memberikan saran agar kontrol manusia dalam penggunaan senjata harus menjadi aspek utama yang diregulasi dan melihat tidak perlu adanya hukum baru yang harus dibentuk dalam meregulasi *lethal autonomous weapon systems*.

Hormat Kami,
Dewan Editor